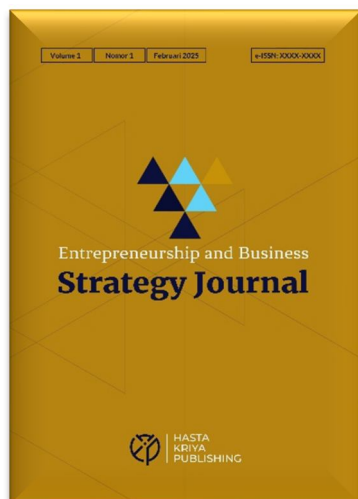




PENERAPAN STRATEGI BISNIS PEMERINTAH-SWASTA DALAM PENGELOLAAN SISTEM DRAINASE PERKOTAAN (STUDI KASUS KOTA SERANG)

Sudirman

Hasta Kriya Publishing, Banten, Indonesia
dirmanhana@gmail.com

Riwayat Artikel

Diterima

November 2024

Revisi

Desember 2024

Terbit

Februari 2025

Keywords:

Public-Private Partnership
(PPP); Urban Drainage;
Infrastructure Sustainability.

ABSTRACT

This study analyzes the implementation of the Public-Private Partnership (PPP) model in urban drainage system management in Serang City. The aim of this research is to assess the impact of the PPP model on the efficiency and effectiveness of drainage management, particularly in reducing flooding. Findings show that while the PPP model accelerates infrastructure development, the main challenge lies in long-term maintenance and system sustainability. Issues like channel blockages due to waste and sediment reduce the effectiveness of drainage. This research highlights the need for better coordination between the government and private sector, as well as public awareness in maintaining drainage cleanliness. The findings offer valuable insights for policymakers to optimize PPP implementation in urban infrastructure projects

Korespondensi:

dirmanhana@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis penerapan model Kemitraan Pemerintah-Swasta (PPP) dalam pengelolaan sistem drainase perkotaan di Kota Serang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi dampak model PPP terhadap efisiensi dan efektivitas pengelolaan drainase, terutama dalam mengurangi banjir. Temuan menunjukkan bahwa meskipun model PPP mempercepat pembangunan infrastruktur, tantangan utama terletak pada pemeliharaan jangka panjang dan keberlanjutan sistem. Masalah penyumbatan saluran akibat sampah dan sedimen mengurangi efektivitas drainase. Penelitian ini menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah dan sektor swasta, serta kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan saluran. Temuan ini memberikan wawasan bagi pembuat kebijakan dalam mengoptimalkan implementasi PPP di proyek infrastruktur perkotaan.

©2025 Entrepreneurship and Business Strategy Journal

How to cite (in APA Style): Dirman. (2025). Penerapan strategi bisnis pemerintah-swasta dalam pengelolaan sistem drainase perkotaan (Studi kasus Kota Serang). *Entrepreneurship and Business Strategy Journal*, 1(1), 39–48.

PENDAHULUAN

Drainase perkotaan merupakan komponen infrastruktur vital yang berperan dalam mengendalikan aliran air hujan agar tidak menimbulkan genangan dan banjir yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat serta membahayakan kesehatan lingkungan (Silveira, 2002oieau.fr). Namun, di banyak kota berkembang, sistem drainase yang ada belum mampu mengimbangi pesatnya laju urbanisasi sehingga banjir lokal masih sering terjadi saat hujan lebat (Limthongsakul et al., 2017mdpi.com; Rentschler et al., 2022nature.com). Studi global menunjukkan bahwa 89% populasi dunia yang terpapar risiko banjir saat ini bermukim di negara-negara berpendapatan rendah-menengah (Rentschler et al., 2022nature.com), menandakan beban disproportional yang ditanggung kota-kota berkembang. Keterbatasan kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola drainase menjadi salah satu faktor utama di balik kondisi ini; keterbatasan anggaran, kurangnya sumber daya manusia terampil, dan lemahnya kelembagaan menghambat upaya perbaikan serta ekspansi sistem drainase (Silveira, 2002oieau.fr; Nahdi et al., 2023mdpi.com). Akibatnya, banyak prasarana drainase perkotaan yang tidak terawat optimal—saluran tersumbat sedimen dan sampah, kapasitas alir berkurang sehingga gagal mengalirkan limpasan air secara efektif dan memperparah risiko banjir (Limthongsakul et al., 2017mdpi.com). Kondisi ini menunjukkan urgensi untuk mencari pendekatan manajemen infrastruktur drainase yang lebih inovatif di luar pola konvensional berbasis peran tunggal pemerintah (Chocat et al., 2001pubmed.ncbi.nlm.nih.gov; Brown et al., 2009).

Salah satu pendekatan strategis yang muncul sebagai alternatif adalah kemitraan pemerintah-swasta atau *Public–Private Partnership* (PPP). PPP merupakan model kerja sama di mana sektor pemerintah dan swasta berbagi peran, risiko, dan sumber daya dalam penyediaan layanan atau infrastruktur publik (Grimsey & Lewis, 2002; Bovaird, 2004). Skema ini telah

berkembang dari konsep yang dulu diperdebatkan menjadi praktik umum di banyak negara sebagai cara inovatif pendanaan dan pengelolaan proyek publik (Bovaird, 2004; Hodge & Greve, 2007journals.sagepub.com). Melalui PPP, pemerintah dapat memanfaatkan investasi modal serta keahlian manajerial pihak swasta untuk mengatasi keterbatasan pendanaan dan meningkatkan efisiensi operasional infrastruktur (Novaes & Marques, 2022mdpi.com; Roehrich et al., 2014). Dalam konteks perkotaan, kolaborasi ini dipandang mampu mempercepat penyediaan infrastruktur dengan kualitas layanan yang lebih baik, karena pembagian risiko dan tanggung jawab diatur dalam kontrak jangka panjang yang mengikat kedua belah pihak (Li et al., 2005; Zhang, 2005). Tentu saja, keberhasilan PPP sangat dipengaruhi oleh sejumlah prasyarat seperti alokasi risiko yang tepat, regulasi pendukung, serta komitmen kuat dari para pemangku kepentingan (Koppenjan & Enserink, 2009; Osei-Kyei & Chan, 2017). Dengan demikian, PPP menawarkan kerangka strategi bisnis kolaboratif yang berpotensi meningkatkan kinerja pengelolaan infrastruktur drainase perkotaan melalui sinergi sumber daya publik dan swasta.

Kota Serang merupakan contoh kota berkembang di Indonesia yang menghadapi permasalahan drainase perkotaan sebagaimana dipaparkan di atas, sehingga menjadi studi kasus yang penting untuk dikaji. Sebagai ibukota Provinsi Banten dengan pertumbuhan urbanisasi yang pesat, Kota Serang kerap mengalami banjir lokal akibat kapasitas drainase yang terbatas serta belum optimalnya pengelolaan infrastruktur tersebut. Meskipun pemerintah daerah telah berupaya melakukan perbaikan, tantangan anggaran dan teknis membuat persoalan genangan masih berulang setiap musim hujan. Di sisi lain, konsep kemitraan pemerintah-swasta belum banyak diterapkan dalam sektor drainase di kota-kota menengah seperti Serang. Kajian terdahulu tentang PPP umumnya berfokus pada sektor transportasi, energi, atau air bersih, dan

lebih banyak dilakukan dalam konteks negara maju (Osei-Kyei & Chan, 2017; Roehrich et al., 2014). Hal ini menyisakan celah penelitian mengenai bagaimana model PPP dapat diadaptasi untuk pengelolaan drainase perkotaan di kota berkembang. Mengkaji Kota Serang melalui perspektif PPP tidak hanya relevan secara praktis bagi kota tersebut, tetapi juga penting secara akademis untuk memperluas cakupan penerapan PPP ke ranah manajemen infrastruktur perkotaan di negara berkembang (Koppenjan & Enserink, 2009).

Penelitian ini bertujuan untuk menjembatani kesenjangan tersebut dengan mengeksplorasi penerapan strategi bisnis kemitraan pemerintah-swasta dalam pengelolaan sistem drainase perkotaan di Kota Serang. Secara khusus, penelitian ini menganalisis bagaimana model PPP dapat meningkatkan kapasitas dan kinerja layanan drainase melalui pembagian peran yang efektif antara pemerintah dan swasta. Secara ilmiah, studi ini diharapkan dapat memberikan dua kontribusi utama. Pertama, pada tataran teoritis, penelitian akan memperkaya literatur manajemen infrastruktur perkotaan dengan memasukkan perspektif strategi kolaboratif PPP di sektor drainase yang selama ini relatif jarang dibahas. Kedua, pada tataran praktis, hasil penelitian dapat menjadi masukan bagi perencana kota dan pembuat kebijakan di kota-kota berkembang dalam merumuskan kebijakan inovatif untuk pengelolaan drainase yang lebih tangguh dan berkelanjutan berbasis kemitraan pemerintah-swasta. Dengan demikian, studi ini berkontribusi menawarkan wawasan baru mengenai solusi kolaboratif guna meningkatkan pengelolaan drainase perkotaan di tengah keterbatasan kapasitas pemerintah.

KAJIAN PUSTAKA

Pendekatan New Public Management (NPM) pada akhir abad ke-20 mendorong adopsi praktik manajemen bisnis dalam sektor publik untuk meningkatkan kinerja layanan publik (Hood,

1991; Bovaird, 2004). NPM menekankan efisiensi, orientasi hasil, dan kompetisi layaknya sektor swasta, sehingga organisasi publik terdorong menyusun rencana strategis dan mengukur kinerjanya secara ketat (Hood, 1991). Penerapan manajemen strategis di institusi publik dipandang sebagai cara untuk meningkatkan koordinasi pengambilan keputusan dan penentuan prioritas, mirip dengan perencanaan strategis di bisnis (Bryson et al., 2010). Penelitian menunjukkan bahwa perencanaan strategis memang telah diadopsi luas di pemerintahan daerah maupun pusat sebagai upaya merespons tekanan lingkungan dan harapan masyarakat akan layanan yang lebih baik (Poister, 2010; Höglund et al., 2018). Dengan kata lain, strategi menjadi alat penting bagi pimpinan publik untuk menetapkan visi, mengarahkan sumber daya, dan berinovasi dalam pelayanan (Bryson et al., 2010; Höglund et al., 2018).

Sejumlah studi empiris menemukan adanya hubungan positif antara penerapan manajemen strategis dengan peningkatan kinerja layanan publik. Misalnya, meta-analisis oleh George et al. (2019) menunjukkan bahwa perencanaan strategis berpengaruh signifikan dalam meningkatkan kinerja organisasi sektor publik. Temuan serupa dikemukakan Boyne dan Walker (2010) yang mencatat bahwa strategi yang jelas dan terimplementasi baik berkontribusi pada pelayanan publik yang lebih efektif. Bahkan di berbagai konteks pemerintahan lokal, organisasi yang memiliki perencanaan jangka panjang dan sasaran terukur cenderung lebih mampu beradaptasi dan meningkatkan kinerja layanan (Andrews et al., 2011; Elbanna et al., 2016). Sebaliknya, tanpa strategi yang terarah, instansi publik rentan terjebak dalam rutinitas birokrasi dan kehilangan fokus terhadap output layanan (Boyne, 2002).

Namun, literatur juga menggarisbawahi bahwa adopsi strategi bisnis di sektor publik perlu disesuaikan dengan karakteristik publik yang khas. Tujuan publik yang lebih beragam dan

adanya akuntabilitas politik membuat implementasi manajemen strategis tidak selalu sederhana (Boyne, 2002; Alonso et al., 2015). Kepemimpinan dan budaya organisasi publik sangat menentukan keberhasilan manajemen strategis (Andrews et al., 2011). Studi di Kanada menemukan bahwa keberhasilan implementasi strategi di instansi publik dipengaruhi oleh keterlibatan pemangku kepentingan dan fleksibilitas selama proses eksekusi (Elbanna et al., 2016). Secara keseluruhan, konsensus ilmiah menyebutkan bahwa manajemen strategis ala bisnis dapat meningkatkan kinerja layanan publik bila diterapkan dengan tepat, disertai adaptasi konteks, kepemimpinan visioner, serta sistem pengukuran kinerja yang jelas (Boyne & Walker, 2010; George et al., 2019). Dengan demikian, strategi bisnis di sektor publik berperan sebagai sarana untuk meningkatkan nilai publik melalui perencanaan yang sistematis, pengambilan keputusan berbasis data, dan inovasi pelayanan (Bryson et al., 2010; Hood, 1991).

Model Kemitraan Pemerintah–Swasta (Public–Private Partnership)

Kemitraan Pemerintah–Swasta atau Public–Private Partnership (PPP) merupakan salah satu bentuk penerapan strategi bisnis dalam penyediaan layanan/infrastruktur publik. PPP didefinisikan sebagai kerja sama jangka panjang antara pemerintah dan swasta dalam pembiayaan, pembangunan, dan pengoperasian fasilitas publik, dengan pembagian risiko di antara para pihak (Hodge & Greve, 2007). Model ini berkembang pesat secara global sejak tahun 1990-an sebagai respon atas keterbatasan dana publik untuk proyek infrastruktur dan keinginan memanfaatkan efisiensi swasta (Bloomfield, 2006; Zhang, 2005). Dalam PPP, sektor swasta biasanya menanggung biaya awal konstruksi dan kemudian mendapatkan pengembalian investasi melalui skema pembayaran oleh pemerintah atau langsung dari pengguna layanan selama masa kontrak (Grimsey & Lewis, 2005). Bagi pemerintah, PPP menawar-

kan peluang percepatan penyediaan infrastruktur dengan berbagi beban pembiayaan dan potensi inovasi manajerial dari mitra swasta (Koppenjan & Enserink, 2009; Roehrich et al., 2014).

Literatur menunjukkan sejumlah faktor kunci kesuksesan PPP. Stabilitas kerangka regulasi dan dukungan politik yang kuat merupakan prasyarat agar investor swasta berminat dan yakin terhadap proyek PPP (Zhang, 2005). Studi meta-analisis oleh Osei-Kyei dan Chan (2015) mengidentifikasi bahwa pembagian risiko yang adil, jaminan kelayakan finansial proyek, serta transparansi proses tender adalah faktor paling kritis dalam keberhasilan PPP di berbagai negara. Demikian pula, komunikasi dan kepercayaan antara pihak publik-swasta perlu dibangun untuk mengatasi perbedaan budaya organisasi (Chou & Pramudawardhani, 2015). Liu et al. (2015) menekankan pentingnya manajemen risiko sepanjang siklus proyek: mulai dari tahap perencanaan, konstruksi, hingga operasional, pemerintah dan swasta harus secara jelas mengalokasikan risiko (contoh: risiko konstruksi, permintaan, politik) kepada pihak yang paling mampu mengelolanya. Jika faktor-faktor ini terpenuhi, PPP dapat menghasilkan proyek infrastruktur yang tepat waktu, efisien biaya, dan berkualitas tinggi dibanding metode tradisional (Zhang, 2005; Osei-Kyei & Chan, 2015).

Di sisi lain, kajian komprehensif Hodge dan Greve (2007) menemukan bahwa kinerja PPP beragam dan tidak selalu lebih unggul daripada penyediaan konvensional. Beberapa proyek PPP berhasil memberikan nilai-untuk-uang (*value for money*) bagi publik, terutama ketika inovasi dan keahlian swasta diterapkan efektif (Bloomfield, 2006; Koppenjan & Enserink, 2009). Namun, ada pula kasus di mana PPP justru mengalami pembengkakan biaya atau kualitas layanan yang mengecewakan, misalnya akibat perjanjian kontrak yang buruk atau kegagalan swasta memenuhi standar (Hodge & Greve, 2007). Evaluasi terhadap skema PPP di berbagai negara menunjukkan hasil yang kon-

tradiktif: sementara PPP di sektor transportasi dan telekomunikasi banyak yang sukses, di sektor air dan kesehatan sering menghadapi tantangan besar (Roehrich et al., 2014). Faktor seperti kapasitas pemerintah dalam mengawasi kontrak dan tingkat korupsi turut memengaruhi keberhasilan PPP (Bovaird, 2004). Di negara berkembang dengan kapasitas institusional lemah, implementasi PPP menjadi lebih menantang, misalnya dalam memastikan kepatuhan kontrak dan perlindungan kepentingan publik (Chou & Pramudawardhani, 2015). Meskipun demikian, secara umum PPP dianggap sebagai skema inovatif yang mampu mendatangkan modal swasta dan meningkatkan efisiensi operasional, asalkan dirancang dengan cermat dan didukung tata kelola yang baik (Grimsey & Lewis, 2005; Koppenjan & Enserink, 2009).

Dalam konteks keberlanjutan, PPP juga berpotensi mendorong praktik bisnis yang lebih ramah lingkungan dan berorientasi jangka panjang dalam penyediaan infrastruktur publik (Koppenjan & Enserink, 2009). Misalnya, kontrak PPP dapat memuat insentif bagi swasta untuk mengintegrasikan teknologi hijau dalam sistem drainase atau transportasi. Namun, keselarasan tujuan publik-swasta tetap krusial: pemerintah harus menetapkan target layanan (misal: pengurangan banjir atau peningkatan cakupan layanan) yang jelas dalam perjanjian, sehingga mitra swasta terikat untuk mencapai sasaran publik tersebut, bukan sekadar mencari keuntungan (Bloomfield, 2006; Hodge & Greve, 2007). Dengan pengalaman internasional yang terus bertambah, model PPP kian matang dan dipandang sebagai salah satu strategi bisnis kolaboratif yang dapat diadaptasi untuk mengatasi keterbatasan pemerintah, termasuk dalam pengelolaan drainase perkotaan, selama risiko dan manfaatnya diatur secara seimbang (Roehrich et al., 2014; Osei-Kyei & Chan, 2015).

Pengelolaan Sistem Drainase Perkotaan di Kawasan Perkotaan Berkembang Pertumbuhan perkotaan yang pesat di negara berkembang

kerap tidak diimbangi dengan pembangunan sistem drainase yang memadai. Hal ini menyebabkan kawasan perkotaan rentan terhadap banjir dan genangan, terutama saat curah hujan tinggi (Douglas et al., 2008; Texier, 2008). Studi tentang kota-kota di Afrika menunjukkan bahwa perubahan iklim yang meningkatkan frekuensi hujan lebat semakin memperburuk dampak buruk drainase yang buruk pada komunitas miskin perkotaan (Douglas et al., 2008). Keterbatasan kapasitas infrastruktur drainase, diperparah oleh alih fungsi lahan secara masif yang mengurangi area resapan, menghasilkan peningkatan limpasan permukaan di perkotaan berkembang (Fletcher et al., 2015). Misalnya, di Jakarta, banjir besar tahun 2007 mengungkapkan kelemahan struktural seperti saluran drainase tersumbat sampah dan kurangnya koordinasi pengelolaan sungai, yang semuanya merupakan masalah laten sehari-hari (Texier, 2008). Kondisi serupa terjadi di banyak kota Asia dan Afrika di mana urbanisasi cepat menyalip kemampuan pemerintah menyediakan drainase yang memadai, menyebabkan hampir setiap musim hujan kota dilanda genangan luas (Parkinson & Tayler, 2003; Rentschler et al., 2022).

Menurut Parkinson dan Tayler (2003), tantangan utama pengelolaan drainase di daerah perkotaan berpenghasilan rendah meliputi: kurangnya perencanaan terpadu, investasi infrastruktur yang minim, serta terbatasnya operasi & pemeliharaan sistem drainase. Di kota-kota berkembang, drainase sering kali dibangun secara ad-hoc dan fragmentaris, tanpa rencana induk, sehingga kapasitas sistem tidak memadai menghadapi pertumbuhan populasi (Yazdanfar & Sharma, 2015). Selain itu, masalah sosial seperti permukiman kumuh di bantaran sungai atau di atas lahan resapan memperburuk situasi. Penduduk miskin perkotaan paling rentan terdampak karena mereka tinggal di area rawan banjir dan biasanya di luar jangkauan layanan drainase formal (Douglas et al., 2008). Studi Texier (2008) di Jakarta menyoroti bahwa

banjir tidak semata fenomena alam, melainkan cermin dari kendala struktural seperti tata kota yang tidak berpihak pada kelestarian lingkungan dan kurangnya koordinasi antar-lembaga dalam manajemen air. Di banyak kota, wewenang pengelolaan drainase tersebar di berbagai instansi (pekerjaan umum, permukiman, dsb.) tanpa integrasi, menghambat respon efektif (Parkinson & Tayler, 2003).

Menghadapi tantangan tersebut, para ahli merekomendasikan pendekatan pengelolaan drainase perkotaan berkelanjutan. Konsep ini dikenal dengan berbagai istilah seperti Sustainable Urban Drainage Systems (SUDS) atau water-sensitive urban design, yang intinya meniru proses alami untuk mengendalikan limpasan air hujan (Fletcher et al., 2015). Alih-alih hanya mengalirkan air secepatnya ke sungai (paradigma drainase konvensional), pendekatan baru fokus pada meningkatkan infiltrasi lokal, penyimpanan air sementara, dan pemanfaatan infrastruktur hijau seperti sumur resapan, biopori, taman hujan, dan kolam retensi (Yazdanfar & Sharma, 2015). Di kota informal atau permukiman padat, strategi drainase inovatif ini membutuhkan partisipasi komunitas, misalnya melalui program gotong-royong menjaga saluran tetap bersih dan pembuatan drainase skala mikro (Jiusto & Kenney, 2016). Penelitian Jiusto dan Kenney (2016) yang mengkaji permukiman informal menunjukkan bahwa solusi berbasis komunitas dan penggunaan teknologi sederhana (misal: selokan tertutup di gang sempit, drum penampung air hujan) dapat mengurangi genangan secara signifikan. Meski SUDS terbukti berhasil di negara maju, implementasinya di negara berkembang menghadapi kendala seperti keterbatasan lahan publik, biaya awal, serta minimnya pengetahuan teknis di tingkat lokal (Baptista et al., 2019). Studi kasus di Brasil mengidentifikasi kurangnya visi strategis, insentif ekonomi, dan kapasitas kelembagaan sebagai hambatan penerapan

drainase berkelanjutan di kota berkembang (Baptista et al., 2019).

Beberapa kota besar di Indonesia mulai mengadopsi pendekatan terpadu untuk mengurangi risiko banjir melalui perbaikan sistem drainase. Kajian di Bandung, Jawa Barat, menunjukkan bahwa laju urbanisasi yang tinggi berkorelasi dengan meningkatnya kejadian banjir, namun dampaknya dapat ditekan melalui kombinasi peningkatan kapasitas drainase primer dan pengendalian penggunaan lahan (Tarigan et al., 2016). Pemerintah kota juga didorong untuk memasukkan aspek resiliensi drainase dalam perencanaan kota jangka panjang (Galarza-Molina et al., 2022). Resiliensi di sini berarti kemampuan sistem drainase beradaptasi dan pulih cepat pascabanjir, misalnya dengan infrastruktur fleksibel dan mekanisme operasi tanggap darurat. Galarza-Molina et al. (2022) menekankan perlunya kebijakan nasional yang mendukung penguatan drainase kota, termasuk pendanaan khusus, standar desain adaptif terhadap iklim, dan kolaborasi multi-pihak. Pendekatan holistik tersebut sejalan dengan agenda pembangunan perkotaan berkelanjutan, di mana sistem drainase tidak lagi dilihat sebagai prasarana teknis semata, tetapi bagian integral dari tata kota yang melibatkan dimensi sosial, lingkungan, dan ekonomi. Secara ringkas, literatur menggarisbawahi bahwa pengelolaan drainase perkotaan di kawasan berkembang membutuhkan kombinasi peningkatan kapasitas fisik (misal: pelebaran saluran, kolam retensi), inovasi hijau (taman resapan, sumur imbuhan), pembenahan kelembagaan, serta pemberdayaan masyarakat lokal untuk mencapai sistem drainase yang efektif dan berkelanjutan (Yazdanfar & Sharma, 2015; Tarigan et al., 2016).

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif untuk mengeksplorasi penerapan strategi bisnis melalui kemitraan pemerintah-swasta (PPP) dalam pengelolaan sistem drainase



perkotaan di Kota Serang. Kota Serang dipilih karena menghadapi tantangan signifikan dalam manajemen drainase dan implementasi PPP. Informan penelitian dipilih melalui purposive sampling, terdiri dari pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Serang, pihak swasta yang terlibat langsung, serta tokoh masyarakat setempat (Patton, 2015). Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, serta analisis dokumen kebijakan terkait. Analisis data dilakukan secara tematik untuk mengidentifikasi pola utama dari data yang diperoleh (Braun & Clarke, 2006). Peneliti hadir di lokasi penelitian selama tiga bulan, Januari hingga Maret 2024, guna memperkuat validitas temuan dengan teknik triangulasi dan member checking (Creswell, 2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Penelitian ini menemukan bahwa penerapan model kemitraan pemerintah-swasta (PPP) di Kota Serang telah berhasil meningkatkan kecepatan dan efisiensi pembangunan awal sistem drainase perkotaan. Hasil wawancara dengan informan utama menunjukkan bahwa keterlibatan sektor swasta membantu mengatasi keterbatasan anggaran pemerintah, memungkinkan proyek drainase selesai lebih cepat dibandingkan dengan metode pembangunan tradisional.

Namun demikian, efektivitas PPP mengalami hambatan pada aspek pemeliharaan dan keberlanjutan sistem jangka panjang. Observasi lapangan menemukan banyak saluran drainase mengalami penyumbatan akibat sedimen dan sampah, yang menurunkan kinerja sistem secara signifikan. Hal ini disebabkan kurang jelasnya pengaturan tanggung jawab pemeliharaan rutin dalam kontrak PPP, mengakibatkan tidak-jelasan peran antara pemerintah dan pihak swasta.

Tantangan lain yang diidentifikasi adalah lemahnya koordinasi antara pemerintah daerah dan pihak swasta. Komunikasi yang bersifat

situasional tanpa adanya forum koordinasi rutin menyebabkan berbagai persoalan teknis dan administratif tidak teratasi secara optimal. Selain itu, lemahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kebersihan saluran drainase ditemukan sebagai tantangan tambahan. Pengamatan di lapangan memperlihatkan praktik membuang sampah ke dalam saluran masih banyak dilakukan masyarakat, mempercepat kerusakan sistem drainase.

Berdasarkan temuan ini, direkomendasikan pembentukan mekanisme kontrak yang lebih jelas mengenai tanggung jawab pemeliharaan jangka panjang. Selain itu, disarankan agar pemerintah dan swasta membentuk forum koordinasi reguler untuk menyelesaikan persoalan teknis dan administratif secara proaktif. Lebih lanjut, program kampanye edukasi masyarakat perlu ditingkatkan guna meningkatkan partisipasi aktif dalam pemeliharaan sistem drainase.

Tabel 1. Temuan Utama
dan Rekomendasi Strategis

Temuan Utama	Rekomendasi Strategis
Efisiensi pembangunan awal melalui PPP meningkat, tetapi pemeliharaan jangka panjang belum optimal	Penyusunan kontrak dengan pembagian tanggung jawab pemeliharaan yang jelas
Koordinasi antara pemerintah dan swasta masih rendah	Pembentukan forum koordinasi rutin antara pemerintah dan swasta
Kesadaran masyarakat terhadap kebersihan saluran rendah	Pelaksanaan kampanye edukasi intensif tentang pemeliharaan drainase

Tabel 1 di atas merangkum secara ringkas temuan utama penelitian beserta rekomendasi strategis yang diusulkan. Diharapkan rekomendasi tersebut dapat membantu meningkatkan efektivitas penerapan model PPP dalam pengelolaan sistem drainase di Kota Serang.

Pembahasan

Penelitian ini menjawab rumusan masalah mengenai efektivitas penerapan model kemitraan pemerintah-swasta (PPP) dalam pengelolaan sistem drainase perkotaan di Kota Serang, me-

ngidentifikasi tantangan dalam implementasi PPP, serta memberikan rekomendasi strategis guna memperbaiki koordinasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa PPP secara efektif mempercepat pembangunan awal sistem drainase, tetapi menghadapi kendala signifikan dalam pemeliharaan jangka panjang dan koordinasi antar pihak terkait.

Efektivitas model PPP dalam mempercepat pembangunan awal yang ditemukan dalam penelitian ini selaras dengan temuan Roehrich et al. (2014), yang menunjukkan bahwa model PPP memang dapat secara signifikan mempercepat pengadaan infrastruktur melalui investasi dan kemampuan teknis dari sektor swasta. Hal ini juga didukung oleh Zhang (2005), yang menyebutkan bahwa model PPP mampu memberikan efisiensi operasional yang lebih baik dibandingkan pendekatan konvensional dalam pembangunan infrastruktur.

Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa keunggulan tersebut tidak berlanjut ke tahap pemeliharaan dan pengelolaan jangka panjang sistem drainase. Temuan ini konsisten dengan hasil studi Osei-Kyei & Chan (2015), yang menunjukkan bahwa tantangan terbesar dari PPP di negara-negara berkembang adalah aspek pemeliharaan rutin dan kejelasan kontraktual mengenai alokasi tanggung jawab pemeliharaan jangka panjang. Studi Chou & Pramudawardhani (2015) juga menggarisbawahi pentingnya kejelasan kontrak dalam mengelola risiko yang dapat mempengaruhi keberlanjutan proyek PPP.

Tantangan koordinasi yang ditemukan dalam penelitian ini sejalan dengan temuan penelitian oleh Liu et al. (2015), yang menegaskan pentingnya komunikasi dan koordinasi terstruktur antara pemerintah dan pihak swasta dalam mengelola proyek PPP. Tanpa koordinasi yang efektif, proyek-proyek PPP sering kali mengalami hambatan administratif dan manajerial yang mengurangi kualitas layanan yang diberikan.

Selain itu, temuan terkait rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pemeliharaan saluran drainase juga didukung oleh studi terdahulu seperti Parkinson & Tayler (2003), yang menemukan bahwa keterlibatan dan partisipasi masyarakat merupakan faktor penting dalam menjaga keberlanjutan infrastruktur publik, termasuk sistem drainase. Jiusto & Kenney (2016) mempertegas bahwa partisipasi masyarakat melalui edukasi dan kampanye kesadaran dapat secara efektif mengurangi perilaku negatif yang merusak infrastruktur publik.

Sebagai kontribusi teoritis, penelitian ini memperkuat pandangan Koppenjan & Enserink (2009) bahwa suksesnya PPP tidak hanya bergantung pada efisiensi awal pembangunan, tetapi juga sangat tergantung pada bagaimana tanggung jawab pemeliharaan dikelola serta bagaimana koordinasi antar pihak dilakukan secara berkelanjutan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Temuan penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan strategi bisnis kemitraan pemerintah-swasta (PPP) dalam pengelolaan sistem drainase perkotaan di Kota Serang secara empiris menunjukkan efektivitas pada tahap awal pembangunan infrastruktur, namun mengalami kelemahan dalam aspek pemeliharaan jangka panjang dan koordinasi antar pemangku kepentingan. Hasil ini memperkuat penelitian sebelumnya yang menyoroti pentingnya kejelasan kontraktual dan manajemen risiko dalam PPP, tetapi juga menambahkan dimensi baru mengenai urgensi partisipasi masyarakat dalam mendukung keberlanjutan proyek drainase. Konsekuensi logisnya, penelitian ini berkontribusi terhadap pengembangan ilmu di bidang administrasi publik dan manajemen infrastruktur dengan memberikan pemahaman teoretis tentang kompleksitas interaksi antaraktor dalam PPP serta implikasinya secara praktis dalam perencanaan kebijakan infrastruktur perkotaan yang adaptif. Temuan ini juga

membuka prospek pengembangan model kontraktual PPP berbasis kolaborasi multistakeholder yang lebih inklusif dan responsif terhadap konteks lokal, yang dapat menjadi pijakan untuk penelitian lanjutan dalam merumuskan strategi kebijakan infrastruktur berkelanjutan di kota-kota berkembang.

Saran

Pemerintah daerah Kota Serang bersama mitra swasta perlu segera menyusun kontrak PPP yang lebih komprehensif dan spesifik, terutama dalam pengaturan tanggung jawab pemeliharaan jangka panjang serta pembentukan mekanisme koordinasi lintas-sektor yang bersifat rutin dan mengikat. Selain itu, diperlukan strategi pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan melalui edukasi publik dan partisipasi aktif dalam pengawasan sistem drainase. Untuk mendukung pengembangan kebijakan berbasis bukti, disarankan agar dilakukan penelitian lanjutan dengan pendekatan kuantitatif atau mixed methods guna mengukur dampak model PPP terhadap efektivitas pengelolaan drainase dan kesejahteraan masyarakat secara lebih terukur. Implikasi praktis dari saran ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara sektor publik, swasta, dan masyarakat demi terwujudnya infrastruktur drainase yang tangguh, berkelanjutan, dan adaptif terhadap tantangan perkotaan masa kini dan mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Chou, J. S., & Pramudawardhani, D. (2015). Cross-country comparisons of key drivers, critical success factors and risk allocation for public-private partnership projects. *International Journal of Project Management*, 33(5), 1136–1150. <https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2014.12.003>
- Jiusto, S., & Kenney, M. (2016). Hard paths, soft paths or no paths? Cross-cultural perceptions of urban water management. *Cities*, 53, 24–32. <https://doi.org/10.1016/j.cities.2015.11.007>
- Koppenjan, J., & Enserink, B. (2009). Public-private partnerships in urban infrastructure: Reconciling private sector participation and sustainability. *Public Administration Review*, 69(2), 284–296. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2008.01974.x>
- Liu, J., Love, P. E. D., Smith, J., Regan, M., & Davis, P. R. (2015). Public-private partnership performance in developing countries: Empirical evidence from urban infrastructure projects. *Construction Management and Economics*, 33(7), 605–617. <https://doi.org/10.1080/01446193.2015.1056140>
- Osei-Kyei, R., & Chan, A. P. C. (2015). Review of studies on the critical success factors for public-private partnership (PPP) projects from 1990 to 2013. *International Journal of Project Management*, 33(6), 1335–1346. <https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2015.02.008>
- Parkinson, J., & Tayler, K. (2003). Decentralized wastewater management in peri-urban areas in low-income countries. *Environment and Urbanization*, 15(1), 75–90. <https://doi.org/10.1177/095624780301500109>
- Roehrich, J. K., Lewis, M. A., & George, G. (2014). Are public-private partnerships a healthy option? A systematic literature review. *Social Science & Medicine*, 113, 110–119. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2014.03.037>
- Zhang, X. (2005). Critical success factors for public-private partnerships in infrastructure development. *Journal of Construction Engineering and Management*, 131(1), 3–14. [https://doi.org/10.1061/\(ASCE\)0733-9364\(2005\)131:1\(3\)](https://doi.org/10.1061/(ASCE)0733-9364(2005)131:1(3))

